

ABSTRAK

Penanganan bagi anak yang berkonflik hukum merupakan isu yang tidak akan pernah ada habisnya, hal ini dikarenakan banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Di era globalisasi dengan perkembangan jaman dan teknologi yang begitu pesat, penanganan anak yang berkonflik hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi perhatian penting bagi segenap pihak yang akan terlibat guna menjamin hak, tumbuh kembang anak, dan kemerdekaan anak agar tidak dirampas. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam penanganannya harus mendapatkan perlakuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kabupaten Sumenep yang salah satu kabupaten di pulau Madura dengan kabupaten bersifat kepulauan tentu saja akan mendapatkan tantangan tersendiri dalam penanganan anak yang berkonflik hukum. Adapun isu hukum yang perlu dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana perbandingan penanganan anak berkonflik hukum di wilayah kota dengan wilayah kepulauan, dan apakah telah sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis-empiris. Adapun lokasi terpilih dalam penelitian ini yakni Polres Sumenep (Unit PPA) dan beberapa Polsek di wilayah kepulauan Sumenep. Data penelitian yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui wawancara. Keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan model penarikan kesimpulan induktif.

Dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan diperoleh bahwa (1) jumlah kasus anak berkonflik hukum di wilayah kepulauan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah kota. (2) dalam penanganannya di wilayah kepulauan terdapat campur tangan kepala adat sedangkan di wilayah kota tidak ada, dan tingkat diversi yang jauh lebih tinggi di bandingkan pada wilayah kota (3) adanya beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Penanganan Anak, Anak berkonflik Hukum, SPPA

ABSTRACT

Handling for children in legal conflict is an issue that will never end, this is because children are the next generation of the nation. In the era of globalization with the rapid development of the era and technology, the handling of children in conflict with the law must be in accordance with the applicable laws and regulations. This is an important concern for all parties who will be involved in order to ensure the rights, growth and development of children, and freedom of children so as not to be taken away. Children as perpetrators of criminal acts in their handling must receive treatment in accordance with applicable laws and regulations. Sumenep Regency, which is one of the regencies on the island of Madura with an archipelagic district, will of course have its own challenges in handling children in conflict with the law. Therefore, this is a legal issue that needs to be studied regarding how to compare the handling of children in legal conflict in the city area with the island territory, and whether it is in accordance with Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

This research is an empirical legal research using a Socio-Legal approach. The locations selected in this study were the Sumenep Police Station (PPA Unit) and several police stations in the Sumenep Archipelago region. The research data used consisted of primary, secondary and tertiary data obtained through interviews. The entire data was then analyzed descriptively qualitatively, with an inductive conclusion drawing model.

From the study conducted, it was found that (1) the number of cases of children in conflict with the law in the archipelago is much less than in the city area. (2) In its handling in the archipelagic territory there is interference from the customary head while in the urban area there is no intervention. (3) there are several things that are not in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

Keywords: *Handling Children, Children in Legal Conflict, SPPA*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1. Jenis Penelitian	12
1.6.3. Lokasi Penelitian	13
1.6.4. Sumber Data Penelitian	13
1.6.5. Teknik Pengumpulan Data	14
1.6.6. Metode Analisis Data	15
BAB II KERANGKA TEORITIK SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	
BERKONFLIK HUKUM	17
2.1 Konsep, Asas, dan Ruang Lingkup SPPA.....	17
2.1.1 Konsep Sppa dalam penanganan anak berkonflik hukum	17
2.1.2 Asas-asas Sppa Dalam Penanganan Anak Berkonflik Hukum.....	22
2.1.3 Ruang lingkup spa	25
2.2 Penyelesaian Anak Berkonflik Hukum dalam Perspektif Teoritis.....	30
2.2.1 Proses penanganan Anak Berkonflik Hukum Berdasarkan SPPA	30
2.2.2 Penyelesaian Anak Berkonflik Hukum dalam Perspektif Teoritis	35
2.3 Tindak Pidana Anak Dan Upaya Mengatasi Anak Berkonflik Hukum	40
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Anak	40
2.3.2 Anak Berkonflik Hukum	41
BAB III PERBANDINGAN PENANGANAN ANAK BERKONFLIK HUKUM DI	
WILAYAH KOTA DENGAN KEPULAUAN	44
3.1. Gambaran Objek Penelitian dan Penanganan Anak.....	44
3.2. Pengaturan Penanganan Anak Berkonflik Hukum di Indonesia Berdasarkan	
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.....	49
3.3. Gambaran Empiris Penanganan Anak Berkonflik Hukum	57
3.3.1. Model Penanganan Anak Berkonflik Hukum di Kabupaten Sumenep .	57

3.3.2. Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA Dalam Penanganan Anak Berkonflik Hukum	64
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan.....	75
4.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lmpiran 1. Dokumentasi wawancara dengan Unit PPA Polres Sumenep...	72
Lampiran 2. Dokumentasi wawancara dengan Polsek Kepulauan di Kabupaten Sumenep	74
Lampiran 3. Dokumentasi perjalanan ke kepulauan	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian penelitian	7
Tabel 2. Jumlah Anak di kabupaten Sumenep	38
Tabel 3. Data jumlah anak berkonflik hukum di wilayah kota	39
Tabel 4. Data jumlah anak berkonflik hukum di wilayah kepulauan	39
Tabel 5. Perbandingan penanganan anak berkonflik hukum pada kedua wilayah	62